

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 KONDISI EKONOMI TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015

a. Kondisi Ekonomi Tahun 2014

Secara keseluruhan, pada tahun 2014 perekonomian nasional tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,03%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,58%. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dari dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, penyesuaian terhadap penerapan kebijakan pengendalian ekspor mineral yang diterapkan pada awal 2015 memerlukan proses konsolidasi perekonomian daerah-daerah yang menjadi basis produksi tentang mineral. Melambatnya perekonomian diberbagai daerah juga terkait dengan masih tingginya ketergantungan beberapa daerah KTI terhadap ekspor komoditas primer yang kinerjanya masih menurun.

Sejak Triwulan IV-2014, BPS merilis PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2010, disamping masih merilis data dengan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar tersebut menyebabkan adanya penyesuaian pada pengelompokan PDRB menurut lapangan usaha maupun menurut pengeluaran. Dari sisi PDRB menurut kelompok lapangan usaha jumlah kelompok berubah dari 9 kelompok menjadi 17 kelompok. Sementara dari sisi PDRB menurut kelompok pengeluaran terdapat tambahan komponen baru yakni net ekspor antar daerah. Pangsa terbesar sektor ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25%), Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (21%) dan sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (13%).

Apabila dibandingkan antara ekonomi tahunan (*year on year*) berdasarkan tahun dasar 2000 dan 2010 maka terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan signifikan juga tampak dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana berdasarkan tahun dasar 2000 mencapai Rp 15,29 triliun, sementara berdasarkan tahun dasar 2010 sebesar Rp 31,73 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 107,6%. Apabila dibandingkan dengan PDRB Nasional tahun 2014 yang hanya naik 4,4% dari Rp. 10.094,9 triliun (TD 2000) menjadi Rp 10.542,7 triliun (TD 2010), maka penyesuaian PDRB Provinsi Maluku jauh lebih besar. Hal ini yang menyebabkan pangsa

perekonomian Maluku terhadap perekonomian nasional untuk tahun 2014 juga meningkat yaitu dari 0,15% berdasarkan tahun dasar 2000 menjadi 0,30% berdasarkan tahun dasar 2010

Perekonomian Maluku pada tahun 2014 tumbuh positif sebesar 6,70 persen meningkat lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 5,26 persen, dan lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,20 persen. Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 dengan 9 sektor usaha, dimana terdapat 3 sektor yang memiliki pertumbuhan dominan antara lain Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-Jasa sedangkan pada Tahun 2014 perhitungan PDRB menggunakan Tahun Dasar 2010 dengan 17 sektor usaha, dimana Pertumbuhan PDRB Sektoral ADHK Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha didominasi oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 31,11%, disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,29%, dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 9,52%. Sementara itu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang sebelumnya menempati urutan ke dua, maka Tahun 2014 menempati urutan ke sepuluh dengan pertumbuhan sebesar 6,45%, sebaliknya pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang sebelumnya rendah pada tahun 2014 menempati urutan ke lima dengan pertumbuhan sebesar 8,42% lebih tinggi dari sektor pertanian, kehutanan dan kehutanan. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengindikasikan struktur ekonomi Maluku telah mengalami perubahan mengarah pada kondisi ideal dengan harapan industri pengolahan tersebut sebagian besar didukung oleh industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan pertanian dan perikanan di Maluku.

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDRB Maluku Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2014 (%)

No.	Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015 (Tw I yoy)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,04	6,23	4,13	6,45	0,17
2	Pertambangan dan Penggalian	11,16	2,77	4,60	10,29	13,36
3	Industri Pengolahan	4,91	5,70	5,80	8,42	3,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,27	10,08	4,00	31,11	10,58
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	3,91	4,53	2,98	5,84	5,42
6	Konstruksi	9,08	7,56	7,74	7,31	2,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,78	9,63	6,88	5,89	6,45
8	Transportasi dan	6,24	6,55	6,55	8,77	3,70

	Pegudangan					
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	8,28	8,21	4,68	3,63
10	Informasi dan Komunikasi	7,40	7,55	9,16	7,62	7,72
12	Jasa Keuangan	19,31	8,96	10,16	7,61	15,64
13	Real Estate	3,35	4,27	2,72	7,10	3,62
14	Jasa Perusahaan	5,63	5,99	5,74	4,83	4,86
15	Adminstrasi Pemerintahan dan Jaminan	9,15	9,38	4,12	5,35	3,36
16	Jasa Pendidikan	2,26	3,53	3,47	9,52	8,16
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	6,12	0,24	2,63	1,49
18	Jasa Lainnya	0,36	1,52	0,40	5,50	0,96
	PDRB	6,34	7,16	5,26	6,70	4,08

Sumber : BPS Maluku Tahun 2015

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Tahun 2014 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,60%, diusul, Adminstrasi Pemerintahan dan Jaminan sebesar 1,04 % dan Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82%. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun laju pertumbuhan sektor pertanian kecil dibandingkan sektor lainnya namun, sektor pertanian memberikan andil yang paling besar dalam pembentukan PDRB Maluku, demikian juga dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB Maluku. Kondisi ini memberikan gambaran yang sama pada periode tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2000 dimana terdapat 3 sektor yang membrikan andil terbesar yakni sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran serta jasa-jasa.

Tabel 3.2. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2014 (%)

No.	Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,80	1,58	1,04	1,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,10	0,17	0,37
3	Industri Pengolahan	0,27	0,31	0,31	0,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,03
6	Konstruksi	0,59	0,50	0,52	0,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,90	1,29	0,94	0,82
8	Transportasi dan Pegudangan	0,33	0,35	0,35	0,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,15	0,15	0,09
10	Informasi dan Komunikasi	0,27	0,27	0,33	0,29
12	Jasa Keuangan	0,59	0,31	0,36	0,28
13	Real Estate	0,01	0,02	0,01	0,03
14	Jasa Perusahaan	0,06	0,07	0,06	0,05
15	Adminstrasi Pemerintahan dan	1,71	1,80	0,81	1,04

	Jaminan				
16	Jasa Pendidikan	0,13	0,20	0,19	0,50
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,15	0,01	0,06
18	Jasa Lainnya	0,01	0,03	0,01	0,10
	PDRB	6,34	7,16	5,26	6,70

Sumber : BPS Maluku Tahun 2015

Berdasarkan dari aspek permintaan pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 dengan menggunakan tahundasar 2010 maka perkenomian Maluku ditopang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 28,73%, disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 7,83%, dan Net Ekspor Antar Daerah sebesar 7,13%. Dibandingkan dengan tahun 2013 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana pada tahun 2013 sebesar 7,85% meningkat menjadi 28,73%.

Sementara itu Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 6,87% dan Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 43,69%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 kedua sektor ini mengalami penurunan yakni untuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 10,93% dan Ekspor Luar Negeri sebesar 7,42%.

Tabel 3.3. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Penggunaan Tahun 2012 - 2015

No	Sektor Ekonomi	2012	2013**)	2014**)	2015 **) (Tw I yoy)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,07	4,89	7,83	16,68
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,80	4,17	5,33	-5,62
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,84	7,85	28,73	35,32
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	21,40	10,93	6,87	-7,64
5	Perubahan Inventori	7,34	11,05	6,65	-57,64
6	Ekspor Luar Negeri	10,54	7,42	(43,69)	23,76
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	15,38	(19,36)	(1,17)	7,80
8	Net Ekspor Antar Daerah	16,28	19,36	7,13	49,19
	PDRB	7,16	5,26	6,68	4,08

Sumber : BPS Maluku, 2015
03 5.43 9.81 5.14

Pada Tabel 3.4. menunjukkan bahwa, kontribusi komponen-komponen PDRB Tahun 2014 yang tetinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 11,97%, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 5,17 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 2,16%. Dibandingkan Tahun 2013 Kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 3,27%, disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,25% disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,19%.

Tabel 3.4. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Penggunaan Tahun 2012 - 2015

No	Sektor Ekonomi	2012	2013**)	2014**)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,69	3,25	5,17
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	0,10	0,12
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,54	3,19	11,97
3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	5,65	3,27	2,16
4	Perubahan Inventori	0,07	0,10	0,06
5	Ekspor Luar Negeri	2,11	1,53	(9,20)
6	Dikurangi Impor Luar Negeri	2,06	(2,79)	(0,13)
	Net Ekspor Antar Daerah	(6,95)	(8,97)	(3,75)
	PDRB	7,16	5,26	6,68

Sumber : BPS Maluku, 2015

Indikator ekonomi makro selanjutnya setelah pertumbuhan ekonomi yaitu Inflasi. Sejak Tahun 2014, BPS Maluku melakukan pengukuran inflasi di dua Kota di Maluku yakni Kota Ambon dan Kota Tual. Laju inflasi Provinsi Maluku cenderung membaik dan terkendali meskipun harus menghadapi tekanan kebijakan harga yang diambil pemerintah seperti kenaikan BBM bersubsidi dan tarif listrik. Laju inflasi Provinsi Maluku Tahun 2014 tercatat sebesar 7,2%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (8,8%) ataupun inflasi nasional (8,4%). Bahkan inflasi Kota Ambon tahun 2014 tercatat lebih rendah lagi yaitu 6,8%. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laju Inflasi Maluku pada Triwulan IV – 2014 mencapai 7,19% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 2,78% (yoy), searah dan berada di rentang yang diperkirakan yaitu naik pada kisaran 6,50% - 7,50% (yoy). Pencapaian inflasi Maluku pada triwulan IV-2014 didorong oleh dampak dari kebijakan pemerintah dibidang energi (BBM dan TDL) faktor cuaca, pelemahan kurs dan dinamika penawaran dan permintaan pada hari-hari besar keagamaan. Inflasi Kota Ambon disumbang oleh kelompok komoditas bahan makanan, biaya tempat tinggal (bahan bangunan) dan transportasi. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 1,29% (yoy) yang disumbang oleh beras, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara itu komoditas transportasi mengalami inflasi sebesar 17,91% (yoy) didorong oleh kenaikan BBM bersubsidi. Peningkatan pasokan ikan segar dan sayur-sayuran berperan penting dalam perlambatan laju inflasi tahunan komponen *volatile food*.

Inflasi kumulatif Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 sebesar 7,19% (ytd), lebih rendah dibanding inflasi kumulatif triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,91% (ytd). Dibandingkan dengan nasional, laju inflasi kumulatif Provinsi Maluku yang pada triwulan laporan lebih rendah dari inflasi kumulatif nasional yang sebesar 8,36% (ytd). Laju inflasi kumulatif Maluku yang pada triwulan laporan berada dibawah inflasi kumulatif nasional disebabkan tingginya tekanan inflasi nasional dari kelompok bahan makanan. Andil komoditas bahan makanan dalam inflasi nasional mencapai 2,06%, didorong oleh inflasi beras, cabai merah dan cabai rawit. Sedangkan tekanan inflasi bahan makanan Provinsi Maluku lebih terkendali, dengan andil hanya sebesar 0,3972% untuk Kota Ambon dan 0,5328 untuk Kota Tual.

Inflasi bulanan kota-kota di Provinsi Maluku pada triwulan IV-2014 menunjukkan peningkatan hingga akhir triwulan laporan. Secara rata-rata, inflasi bulanan Kota Ambon pada triwulanan IV sebesar 0,94%, lebih tinggi dibanding rata inflasi triwulan bulanan pada tahun sebelumnya sebesar 0,003%. Kondisi yang sama terjadi di Kota Tual dengan rata-rata inflasi bulanan pada triwulan IV sebesar 2,16% atau lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi riwulan sebelumnya yang sebesar 1,24%. Sementara itu, dilihat dari volatilitas inflasi, Kota Ambon mengalami peningkatan volatilitas pada triwulan IV yaitu sebesar 0,86% dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 0,23%. Sebaliknya, inlasi Kota Tual lebih stabil di triwulan IV yaitu sebesar 0,71% dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 1,24%.

Secata tahunan, laju inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual menunjukan peningkatan pada triwulan IV – 2014, dengan rata-rata inflasi Kota Tual melebihi rata-rata inflasi tahunan Maluku. Inflasi tahunan Kota Tual yang sebesar 11,48% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi Maluku pada triwulan IV yang sebesar 7,19% (yoy). Sementara pencapaian inflasi Kota Ambonyang sebesar 6,81% (yoy) masih berada dibawah inflasi Kota Tual maupun inflasi Maluku. Secara umum laju inflasi tahunan Kota Ambon dan Kota Tual berada dalam tren meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang masing-masing hanya 2,27% (yoy) dan 8,85 (yoy) pada triwulan III-2014.

Tabel. 3.5. Inflasi Kota-Kota di Provinsi Maluku Per Kelompok Tahun 2014

Kelompok Komoditas	Ambon (qtq 2014)				Tual (qtq 2014)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Bahan makanan	4,74	0,23	-3,82	0,32	1,19	-1,68	2,24	11,34
Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	0,43	(0,54)	0,66	1,31	0,61	3,07	1,71	2,45
Perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar	1,26	2,17	1,77	1,73	0,20	0,68	2,63	2,71
Sandang	0,78	0,95	0,65	(0,07)	0,37	1,04	10,06	3,30
Kesehatan	0,75	0,12	2,43	2,67	3,27	-0,25	3,43	7,66
Pendidikan, rekreasi & olahraga	0,32	1,91	0,81	0,99	0,15	0,14	-0,04	1,00

Transport, komunikasi & Jasa Keuangan	3,49	3,49	0,70	9,33	-5,60	6,17	11,11	9,29
Total	2,31	1,50	0,01	2,84	0,09	0,74	4,71	6,61

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2015

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, perkembangan indikator sosial ekonomi lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan perbaikan kecenderungan yang menggembirakan. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 322.510 orang pada tahun 2013 turun menjadi 307.020 orang pada tahun 2014. Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Maluku, tingkat kemiskinan juga telah turun dari 19,27 persen pada tahun 2013, dan tahun 2014 turun mnjadi mencapai 18,44 persen.

Selama periode Maret 2013 – Maret 2014, penduduk miskin didaerah perdesaan berkurang 5.820 orang, sementara di daerah perkotaan berkurang sebanyak 2.370 orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih tinggi yaitu sebesar 25,49% dibandingkan dengan daerah perkotaan yang mencapai 7,35%. Sementara itu peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada bulan September 2014, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 75%.

Struktur ketenagakerjaan di Maluku masih fluktuatif. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2013 mencapai 610.362 orang, turun menjadi 601.651orang pada tahun 2014. Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 8.711 orang. Demikian halnya dengan jumlah pengangguran pada tahun 2013 sebanyak 53.119 orang atau 9,75% meningkat menjadi 70.653 orang atau 10,51%. Ini berarti selama periode tahun 2013 – 2014 telah terjadi penambahan pengangguran sabanyak 17.534 orang atau naik 0,76%. Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2013 disebabkan oleh jumlah lulusan SMA atau sederajat dan sarjana baru pada tahun 2014 tidak terserap pada lapangan kerja sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat.

b. Perkiraan Kondisi Ekonomi Tahun 2015

Pemulihan perekonomian global masih akan terus berlangsung, terutama ditopang oleh perekonomian AS yang semakin solid. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 3,6% dan terus membaik hingga 3,8% pada tahun 2016 terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi AS yang lebih konsisiten. Pemulihan ekonomi AS yang didukung oleh konsumsi yang meningkat seiring dengan urunnya harga minyak dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan.

Disisi lain perekonomian Tiongkok diperkirakan terus melambat seiring penurunan investasi. Sejalan dengan pola pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan masih belum merata. Sejalan dengan itu, harga komoditas global termasuk harga minyak, diperkirakan maihakan berada pada level yang rendah. Harga komoditas yang diperkirakan masih terus menurun semakin memperkuat indikasi telah berakhirnya era *boom* kenaikan harga komoditas global. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya pertumbuhan kelompok

negara-negara berkembang terutama Tiongkok yang selama ini menjadi salah satu sumber permintaan komoditas global.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kondisi perekonomian dunia. Pada tahun 2015, perekonomian dunia diproyeksi akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 terutama akan didorong oleh perekonomian di negara maju. Berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi yang telah dilakukan selama ini telah berhasil mengurangi kerentanan perekonomian di negara maju.

Di samping itu, defisit transaksi berjalan khususnya di negara-negara emerging market yang sempat memburuk pada tahun 2013 mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun demikian, pada tahun 2015, perekonomian global diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan antara lain yaitu rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang berpotensi memberikan gejolak pada pasar keuangan dan perlambatan kinerja perekonomian di Tiongkok.

Kedua faktor tersebut diperkirakan akan mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik serta terpilihnya pemerintahan yang baru secara demokrasi merupakan faktor pendorong akselerasi perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US\$ per barel. Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Proyeksi Bank Indonesia, sejalan dengan semakin sinkronnya berbagai bauran kebijakan, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan serta stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh perbaikan ekonomi global, meskipun berjalan lambat dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan lebih tinggi yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8 persen didukung oleh investasi pemerintah, sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif termasuk pembangunan infrastruktur. Inflasi 2015 diperkirakan berada pada kisaran inflasi $4\pm 1\%$. Hal ini didukung oleh terkendalinya inflasi inti dan menurunnya harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan bauran kebijakan dan koordinasi yang ditempuh BI dan Pemerintah. Kebijakan tersebut diperkuat dengan koordinasi yang semakin baik dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui TPI dan TPID.

Proyeksi Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2015 pada kisaran 5,9 – 6,4%. Jika ditinjau secara triwulanan, perekonomian Maluku pada triwulan I 2015 diperkirakan mencatatkan tren yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Bank Indonesia memperkirakan baseline pertumbuhan triwulanan ekonomi Maluku triwulanan IV 2014 sebesar -0,89% (qtq), menurun dibandingkan triwulan IV 2014 yang sebesar 2,15% (qtq). Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 seiring dengan ekspektasi konsumsi masyarakat yang cenderung turun berdasarkan Survey Konsumen yang mencatat dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap Triwulan I 2015 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi sesuai RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2015 sebesar 6,25% dimana masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional yang akan berdampak pada ekonomi daerah, maka dalam penyusunan RKPd Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2015 diproyeksikan sebesar 6,4 – 6,9 persen dan Tahun 2016 sebesar 6,6 – 7,00 persen.

Berdasarkan Laporan BPS Maluku, perekonomian Maluku triwulan I tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp 8,22 triliun. Ekonomi Maluku Triwulan I – 2015 tumbuh -1,91% dibanding triwulan IV tahun 2014. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Pendidikan sebesar 3,24%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 14,69%. Ekonomi Triwulan I-2015 bila dibandingkan triwulan I-2014 (yoy) tumbuh 4,08% melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,92%.

Pertumbuhan PDRB Maluku pada tahun 2015 diperkirakan pada rentang 6,4 – 6,9 persen (y.o.y). Dari sisi permintaan, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan memberikan andil yang cukup besar disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Antar Daerah. Beberapa even nasional penting di Provinsi Maluku di Tahun 2015 diperkirakan akan meningkatkan pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat antara lain Pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan penyelenggaraan Pesparawi tingkat Nasional di Maluku serta penyelenggaraan PEMILUKADA di beberapa Kabupaten di Maluku.

Kinerja ekspor diperkirakan meningkat sedangkan impor diperkirakan melambat seiring dengan nilai tukar rupiah yang masih dalam tren terdepresiasi yang menyebabkan harga ekspor cenderung murah dan harga impor cenderung mahal. Tren depresiasi nilai tukar rupiah menyebabkan meningkatnya permintaan eksternal terhadap komoditas unggulan Maluku. Untuk ekspor hasil laut diperkirakan akan turun sejalan dengan dilakukannya moratorium kegiatan perikanan tangkap, terkecuali untuk perikanan budidaya seperti udang masih akan terus meningkat.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku 2015 akan didorong oleh kategori-kategori ekonomi dengan pertumbuhan tinggi, yakni pengadaan listrik, gas; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara itu, ekspektasi dunia usaha pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan diperkirakan sedikit tertahan.

Laju inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2015, sesuai hasil proyeksi Bank Indonesia sebesar 6,0 – 7,0 %. Sementara itu proyeksi RPJMD Maluku, inflasi berada pada kisaran 6,5 – 7,5%. Sejalan dengan itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 infalsi Maluku tahun 2015 diproyeksikan berada pada kisaran 6,5-7,5 persen atau sama dengan proyeksi RPJMD.

Secara umum faktor resiko inflasi tahun 2015 akan lebih banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran. Dari sisi permintaan, perayaan hari besar agama sedikit menambah tekanan inflasi *volatile food* dan komoditas inti di Maluku. Sebagaimana pola inflasi komoditas pada tahun-tahun sebelumnya, permintaan terhadap bawang merah, ikan cakalang, cakalang asap dan sayuran segar akan cenderung stabil. Moderasi permintaan terhadap angkutan udara di saat *low season* dan konsumsi Elpiji 12 kilogram yang masih sangat rendah di Maluku diprediksi akan mampu menekan inflasi *administered price* pada tahun 2014.

Dari sisi penawaran, meningkatnya tekanan inflasi pangan terkait faktor cuaca serta faktor kebijakan *administered prices* seperti kenaikan tarif tenaga listrik serta potensi adjusment biaya produksi dan distribusi akibat perubahan asumsi nilai tukar, harga minyak dan inflasi. Potensi kenaikan tarif angkutan udara sebagai dampak integrasi harga tiket dan *passenger service charge/airport tax* di tengah periode *high season* industri penerbangan, serta kenaikan harga LPG 12 kg turut memberikan andil tekanan inflasi di tahun 2015.

Dari sisi permintaan, bervariasinya kebutuhan masyarakat berpotensi menambah tekanan inflasi. Perayaan hari besar agama berdampak pada peningkatan inflasi *volatile food* dan komoditas inti di Maluku. Khusus ikan segar dan daging, meningkatnya kebutuhan akan mendorong peningkatan harga daging sapi dan ayam di daerah produsen. Sementara untuk ikan segar, pola konsumsi masyarakat Maluku yang cenderung lebih memilih komoditas ikan segar dibandingkan ikan beku juga turut menjadi kendala dalam menjaga pasokan ikan segar. Kenaikan UMP tahun 2015 sebesar 16,61% juga berpotensi mendorong peningkatan ekspektasi pengeluaran masyarakat dan menambah tekanan inflasi dari sisi permintaan. Beragamnya potensi kebutuhan masyarakat tersebut diperkirakan akan berdampak pada peningkatan inflasi pada angkutan udara, sayuran segar, ikan segar, beras, makanan jadi dan ikan diawetkan sebagaimana juga pada tahun sebelumnya.

Perekonomian Maluku diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ekonomi akan datang. Tingkat kepercayaan konsumen ini akan menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan inflasi yang terkontrol. Namun demikian peningkatan daya beli tersebut dapat terkoreksi bila terdapat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak.

Tabel 3.6. Indikator Makro Ekonomi Maluku, Tahun 2015-2016

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)	5,14	6,70	6,4- 6,9	6,5 – 7,00
2.	Tingkat inflasi (%)	8,81	7,12	6,5 – 7,5	6,00 – 7,00
3.	Tingkat kemiskinan (%)	19,27	18,44	16,95	15,68
4.	Tingkat pengangguran (%)	9,75	10,51	6,16	5,71
5.	Eksport (juta US\$)	-	-		

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2015 (data diolah)

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN TAHUN 2016.

Beberapa tantangan ekonomi yang akan dihadapi ditengah optimisme perbaikan kondisi perekonomian tahun 2015 masih diperkirakan akan masih terjadi di tahun 2016 yakni beberapa resiko yang dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah, yakni : 1) risiko terkait lambannya perbaikan ekonomi global akibat risiko memburuknya perekonomian Tiongkok, Euro Area dan Jepang masih cukup besar; 2) risiko penurunan harga komoditas ekspor sehingga menekan pendapatan ekspor daerah; 3) risiko terkait kemampuan dan kapasitas pemerintah pusat maupun daerah dalam implementasi percepatan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, risiko yang terkait inflasi diperkirakan lebih didominasi oleh risiko yang bersifat *downside risk*, antara lain yaitu prospek harga komoditas yang diperkirakan rendah, potensi daya beli masyarakat rendah yang diperkirakan terbatas terkait masih rendahnya pendapatan ekspor karena faktor harga yang rendah dan implementasi berbagai program Ketahanan Pangan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi yang intensif, khususnya mengingat risiko yang teridentifikasi mencakup lingkup implementasi di tingkat daerah. Urgensi percepatan implementasi pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi di Maluku. Hal ini disebabkan karena Maluku termasuk daerah yang memiliki biaya ekonomi tinggi dengan kondisi geografis berciri kepulauan. Oleh karena itu, infrastruktur yang terkait dengan konektivitas menjadi tulang punggung utama bagi efisiensi kegiatan ekonomi sekaligus kunci *quick wins* untuk memacu daya saing daerah. Selain konektivitas, fokus pemerintah untuk membangun ekonomi dengan pendekatan pengembangan kemaritiman mestinya memberikan dampak yang signifikan terhadap Maluku sebagai wilayah yang berciri kepulauan. Pengembangan kemaritiman antara lain melalui optimalisasi sumber daya yang terkandung didalam wilayah kelautan Indonesia, termasuk Maluku guna mendongkrak kinerja ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pada tahun 2016, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh 5,6 – 6,0 %. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap didorong oleh tiga lapangan usaha utama yakni lapangan usaha industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan hotel dan restoran. Kinerja ekonomi yang lebih baik tersebut ditopang oleh daya beli yang tetap resilien sejalan dengan ekspansi kelas menengah yang tetap berlanjut. Pada tahun 2016, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan inflasi masih berada dalam rentang 4±1%. Sumber tekanan inflasi antara lain diperkirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat ditengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas.

Tantangan dan prospek perekonomian Maluku tahun 2016 sangat dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Salah satu tantangan di tahun 2016 yakni pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (*Asian Economic Community*). Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai tahun 2015 merupakan komitmen bersama anggota-anggota ASEAN untuk menyatukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2016, perekonomian dunia diperkirakan akan mulai tumbuh lebih baik dibanding tahun 2015, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) perekonomian negara-negara kawasan Asia yang mulai melemah, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran.

Secara Nasional, tantangan utama yang akan dihadapi dalam rancangan RPJMN 2015 – 2019, antara lain :

- upaya jangka panjang agar keluar dari *Middle income trap pada tahun 2030* diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : i) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan; ii) transformasi struktur ekonomi yang didukung oleh pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi; iii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; iii) ketahanan pangan, energy dan air; iv) penyediaan infrastruktur yang memadai
- Percepatan pemerataan pembangunan pengurangan kesenjangan
- Pemberantasan korupsi
- Percepatan konsolidasi demokrasi
- Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim

Proyeksi Bank Indonesia Perekonomian nasional 2016 diperkirakan akan semakin membaik dibandingkan tahun 2015. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2016 sebesar 5,7%, meningkat dibanding tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 5,5%.

Optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 sejalan dengan perkiraan World Bank, yaitu sebesar 5,5%, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,2%. Menguatnya perekonomian Indonesia 2016 bersumber dari pertumbuhan konsumsi domestik yang relatif stabil, percepatan pengeuaran investasi dan volume ekspor yang meningkat secara bertahap

Sementara itu pada Rancangan RKP 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 berada pada kisaran 6,3%-6,9% (yoy). Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi global. Peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik ke depan dipengaruhi oleh: perbaikan kinerja neraca perdagangan Indonesia, peningkatan kegiatan investasi dan konsumsi dalam negeri yang tetap tinggi. Laju inflasi jangka menengah diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku 2016 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan pada kisaran 5,7%-6,7%. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4.60% - 5.10%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan tumbuh 4,40% - 4,80%. Secara umum, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kinerja subsektor perikanan seiring dengan status Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan meningkatnya permintaan domestik maupun ekspor. Pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Maluku mencapai 457.240 ton/tahun, dimana laut Banda berkontribusi sebesar 240.948 ton/tahun, Laut Arafura sebesar 171.093 ton/tahun dan Laut Seram sebesar 45.199 ton/tahun, dari potensi perikanan tangkap sebesar 1.640.030 ton/tahun (Hasil Kajian terhadap Stok Ikan di Wilayah Penangkapan Provinsi Maluku pada tahun 2001). Meningkatnya sektor ini juga didukung dengan meningkatnya subsektor tabama seiring dengan penambahan luas lahan tabama (padi, kedelai dan jagung) dan meningkatnya sasaran produksi padi dan jagung pada 2016.

Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan tumbuh terbatas pada kisaran 6.90% - 7.40%, tumbuh moderat dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan tumbuh 6,80% - 7,83%. Tingginya kinerja sektor ini seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, terutama dari sisi perdagangan eksternal (ekspor-impor) sebagai dampak efektif berlakunya MEA 2015. Kinerja sektor ini ke depan didorong oleh penyelenggaraan even dan festival besar, baik yang berskala

nasional maupun regional, yang diadakan di Maluku, sebagai hasil dari gencarnya rangkaian acara “Tahun Wisata Mangente Ambon” yang dilaksanakan pada tahun 2015

Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib diperkirakan tumbuh pada kisaran 6.75% - 7.25%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan tumbuh 6,50% - 7,00%. Tumbuhnya sektor ini masih digerakkan oleh jasa pemerintahan umum dan pertahanan mengikuti pola penyerapan yang normal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pendorong kinerja sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 2016 ini seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD dan Dana Perimbangan/DP) dan belanja rutin (belanja pegawai dan bantuan sosial) pemerintah, baik yang berasal dari APBD maupun APBN

Sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh pada kisaran 6.75% - 7.25%, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang diperkirakan tumbuh 6,50% - 7,00%. Kinerja sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di Maluku melalui pembangunan infrastruktur, baik jalan, pelabuhan, angkutan laut, maupun udara.

Meningkatnya kinerja sektor transportasi ini sejalan dengan target capaian pemerintah daerah pada RPJMD Maluku 2014-2019 dimana jumlah arus penumpang angkutan umum ditargetkan meningkat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 5.469.985 orang, meningkat dibanding tahun 2015 yang ditargetkan sebanyak 5.209.958 orang. Di samping itu, proyek Jembatan Merah Putih yang ditargetkan selesai pada tahun 2015 dapat menarik ke atas tumbuhnya sektor transportasi dan pergudangan. Risiko yang dapat menahan kinerja sektor transportasi dan pergudangan ke depan adalah kenaikan tarif angkutan, baik darat, laut maupun udara akibat kebijakan pemerintah ke depan

Bank Indonesia memproyeksikan beberapa faktor yang akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku di tahun 2016 antara lain Percepatan proyek infrastruktur seperti Tol Laut, Peningkatan konektivitas di Pulau Ambon pasca operasional Jembatan Merah Putih, Peningkatan produksi perikanan sejalan dengan implementasi program Lumbung Ikan Nasional, serta Implementasi MEA.

Sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia terhadap ekonomi Maluku di tahun 2016, pada RPJMD Maluku ditargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 6,50 %. Terkait dengan itu dalam penyusunan APBD Tahun 2016 pemerintah daerah menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2016 sebesar 6,5 – 7,0% . Target ini tidak berbeda jauh dengan proyeksi Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2016 yakni 6,1%-6,6%.

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2016 diproyeksikan akan dapat mencapai 6,5 – 7,0 persen dan tingkat inflasi pada tahun 2016 diperkirakan 6,00 – 7,00 persen. Peningkatan dan stabilitas ekonomi yang terjadi diharapkan dapat turut mendorong penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian terdapat beberapa tantangan yang harus tetap diperhatikan untuk dapat mencapai target-target tersebut.

Beberapa isu strategis yang akan menjadi tantangan di tahun 2016 antara lain tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masih rendahnya ketahanan pangan

daerah, rendahnya daya saing ekonomi daerah dan pengembangan komoditas unggulan daerah, terbatasnya infrastruktur dasar, dan rendahnya cakupan energy.

Sejalan dengan Tema RKPD Tahun 2016 yakni “Melanjutkan peningkatan *daya saing ekonomi daerah dan sumber daya manusia yang didukung konektivitas antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat berbasis kepulauan*”. Selanjutnya, atas dasar tema ini maka kebijakan pembangunan tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi antara lain melalui peningkatan Pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan Industri berbasis komoditi unggulan daerah yang meliputi sektor kelautan perikanan, pariwisata bahari, perkebunan, dan pertambangan migas, inovasi dan teknologi. Selain itu perlu terus ditingkatkan SDM yang berkualitas melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sesuai dengan ciri dan karakter fisik daerah Maluku sebagai Provinsi Kepulauan.

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diatas rata-rata nasional. Kebijakan ekonomi makro dalam tahun 2016 diarahkan untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku. Selain itu kebijakan makro juga diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran. Pengembangan dan peningkatan khususnya pada sektor-sektor produktif antara lain pertanian dan perikanan akan diarahkan pada pengembangan industri pengolahan antara lain industri pengolahan (pabrik) rumput laut di daerah potensial dengan produksi diatas skala minimal untuk kebutuhan industri yang berkelanjutan. Komoditas rempah Maluku seperti pala dan cengkeh akan terus ditingkatkan ekspornya.

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada seperti perijinan, kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur serta peningkatan aksesibilitas dunia usaha dan masyarakat kepada lembaga keuangan. Disamping itu, usaha kecil, menengah dan koperasi perlu didorong peranannya, terutama dengan meningkatkan aksesnya ke sumber daya pembangunan.

Berdasarkan rancangan RPJMN 2015 - 2019 dimana “**Kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional**” yang merupakan sumber pendapatan baru untuk mendukung transformasi ekonomi sebagai *Middle Income Countries*, maka Provinsi Maluku dengan potensi kelautan perikanan yang melimpah dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berupaya agar “**Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional**” harus didukung dengan regulasi secara khusus dan kerangka pendanaan yang memadai.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku 2016 pada umumnya diarahkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan target kinerja pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-paya yang dilakukan antara lain :

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi daerah
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antara SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peran pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk pajak daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
 - Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, samsat keliling, serta penyederhaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - Meningkatkan informasi dan komunikasi pajak daerah;
 - Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antara instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - Membangun sistem pembayaran pajak melalui elektronik payment (e-payment) danb secara bertahap memnghapus sistem pembayaran pajak melalui petugas pajak;
 - Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

3.2.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari perkembangan realisasi PAD yang pada tahun 2013 baru mencapai 304,51 milyar rupiah direncanakan meningkat menjadi 548,86 milyar rupiah pada tahun 2016. Peningkatan tersebut diikuti pula oleh kelompok pendapatan dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk tahun 2016 target PAD turun dari 612,01 milyar rupiah di tahun 2015 menjadi 548,86 milyar rupiah atau turun 10,32%. Sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi hampir sebesar 60% terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga nantinya dapat mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sifatnya terbatas. Perkembangan tentang realisasi dan target pendapatan daerah dapat diikuti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2013 s.d Tahun 2017

No.	U r a i a n	J u m l a h				
		Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2014	Target T.A. 2015	Proyeksi T.A. 2016	Proyeksi T.A. 2017
1	2	4		5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	304.513.040.086	425.565.463.895	612.015.056.123,50	548.865.252.089,25	648.891.625.961
1.1.1.	Pajak Daerah	217.800.852.046	279.566.231.253	408.789.258.094.70	332.765.414.065,25	479.058.162.148
1.1.2.	Retribusi Daerah.	43.994.597.991	70.162.843.633	84.058.343.975,00	80.849.317.364,00	69.902.663.813
1.1.3.	Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.311.338.769	31.317.239.117	32.651.900.000,00	52.600.000.000,00	74.001.900.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	23.406.251.280	44.519.149.892	86.515.554.053,80	82.650.520.660,00	25.928.900.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.026.829.360.758	1.165.471.923.932	1.482.956.726.000,00	1.597.102.698.000	1.591.525.026.695
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	75.747.288.758	75.633.451.932	88.267.452.000,00	88.267.452.000,00	140.871.696.095
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	897.657.192.000	1.019.704.312.000	1.177.774.674.000	1.260.897.986.000	1.351.038.030.600
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	53.424.880.000	70.134.160.000	216.914.600.000	247.937.260.000	99.615.300.000
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	214.270.809.000	232.132.491.000	293.482.859.000	332..455.013.000	301.849.080.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	415.549.000	218.650.000	391.459.000	215.000.000	215.000.000
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi	213.855.260.000	231.913.841.000	293.091.400.000	332.240.013.000	301.634.080.000
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan	-	-	-	-	-
1.3.6.	Dana Penguatan Infrastruktur, Desentralisasi Fiskal, dan Percepatan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.545.613.209.844	1.823.169.878.827	2.388.454.641.123,50	2.478.422.963.089,25	2.542.265.732.656

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku (2015), data diolah kembali

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi *input* dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan *output* layanan publik yang optimal.

Terkait dengan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku dalam Tahun 2016 merumuskan kebijakan belanja daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Kebijakan penganggaran belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2016 senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pola pengaturan yang proporsional, efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2016. Disamping itu pula, kebijakan belanja daerah tahun 2016 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat termasuk wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun atau pendidikan murah dan bermutu, pengobatan gratis bagi masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk pembangunan perdesaan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah ini diarahkan untuk :

1. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total APBD tahun 2016.
4. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari total APBD tahun 2016.
5. Mendukung pelaksanaan program-program prioritas pembangunan untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2014 – 2019 seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan.
6. Meningkatkan porsi belanja langsung agar lebih besar dari belanja tidak langsung melalui peningkatan belanja program dan kegiatan pada SKPD.
7. Mengupayakan peningkatan porsi belanja modal minimal 30% dari total belanja dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.
8. Mendorong program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama Pajak dan Retribusi daerah.

Terkait dengan rencana alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2016 dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

No.	U r a i a n	J u m l a h				
		Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2014	Target 2015	Proyeksi T.A. 2016	Proyeksi T.A. 2017
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH					
2.1.	Belanja Tidak Langsung	939.228.839.856	830.868.693.355	1.131.024.291.642,77	1.153.097.150.644,78	1.148.610.051.214
2.1.1.	Belanja Pegawai	360.075.315.352	392.741.104.676	504.152.569.579,85	533.206.408.664,00	537.620.222.901
2.1.2.	Belanja Bunga	1.644.657.420	1.192.613.179	874.408.639,50	557.947.686,22	874.408.640
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	459.681.992.667	306.012.794.821	404.054.175.321,	379.900.500.000	344.697.541.150
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.992.696.287	2.016.380.197	12.000.000.000	13.272.000.000	5.700.000.000
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	91.395.307.902	102.848.333.804	184.397.702.111,91	197.180.282.344,05	216.092.878.523
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	19.008.296.828	24.215.569.678	21.545.435.990,51	18.980.011.950,51	26.125.000.000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.430.573.400	1.841.897.000	4.000.000.000	10.000.000.000	17.500.000.000
2.2.	Belanja Langsung	637.219.990.181	895.264.571.735	1.423.252.339.502,51	1.402.554.188.324,76	1.430.121.090.850
2.2.1.	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	637.219.990.181	895.264.571.735	1.423.252.339.502,51	1.402.554.188.324,76	1.531.659.102.000
	Jumlah Belanja	1,576.448.830.038	1.726.133.265.090	2.388.454.641.123,50	2.555.651.338.969,54	2.680.269.153.214
	Surplus/(Defisit)	(30.984.155.979)	(97.036.613.738)	(165.821.990.021,78)	(77.228.375.880,29)	(138.003.420.558)

Sumber : Biro PKKD Setda Maluku (2015), data diolah kembali

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka perlu dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dan sebaliknya, apabila anggaran di perkirakan surplus maka harus di manfaatkan melalui pembiayaan.

3.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan daerah yang perlu atau harus dibayar kembali. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2016 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan diharapkan mampu menutupi defisit anggaran.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2016, Pengeluaran Pembiayaan di peruntukan bagi Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah dan pembentukan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Pattimura.

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017

No.	U r a i a n	J u m l a h				
		Realisasi T.A. 2013	Realisasi T.A. 2014	Target 2015	Proyeksi T.A. 2016	Proyeksi T.A. 2017
3.1.	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.438.146.481	89.547.970.487	168.680.475.057,04	46.464.261.311,55	65.739.305.989
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	65.000.000.000,00	75.000.000.000
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	149.438.146.481	89.547.970.487	168.680.475.057,04	111.464.261.311,55	140.739.305.989
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	15.000.000.000	-	30.000.000.000	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000	-	-	1.500.000.000	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	3.906.020.015	2.735.885.431	2.735.885.431	2.735.885.431	2.735.885.431
	Pembayaran Hutang Pihak ketiga			122.599.604	-	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.906.020.015	17.735.885.431	2.858.485.035,26	34.235.885.431,26	2.735.885.431
	Pembiayaan Neto	120.532.126.466	71.934.684.660	165.821.990.021,78	77.228.375.880,29	138.003.420.558
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	89.547.970.487	168.971.709.956	-	-	-

Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku (2015), data diolah kembali